

**ANALISIS POTENSI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS : TAHUN 2010-2016)***ANALYSIS OF POTENTIAL AREA OF CENTRAL JAVA PROVINCE (CASE STUDY: 2010-2016)***Rian Destiningsih[✉], ²Andhatu Achsa, ³Yustirania Septiani**^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar**Abstrak**

Potensi wilayah dalam rangka otonomi daerah semakin digali dari sisi keilmuan dan lapangan. Otonomi daerah yang digaungkan sejak tahun 2001 menuntut daerah secara nyata dan bertanggung jawab dalam hal mengelola sumber pendapatan yang ada supaya meningkatkan perekonomian daerah. Potensi daerah dalam penelitian ini digali menggunakan alat analisis *shiftshare E-M*, *connectivity quotient (CQ)*, dan *Klassen Tipologi*. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Sektor yang kompetitif dan terspesialisasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016 yaitu sektor industri pengolahan karena memiliki daya saing tinggi karena nilai *Differential Shift (Cj)* lebih besar daripada *Jawa Tengah Share (Nj)*. (2) *CQ* Provinsi Jawa Tengah dibandingkan provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam memiliki posisi kurang menguntungkan dalam berinteraksi dengan provinsi- provinsi lainnya. Sedangkan *CQ* setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa ada 19 kabupaten/kota tergolong ke dalam wilayah yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi yakni Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Kudus, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan. (3) Provinsi Jawa Tengah berada pada kuadran empat dimana Jateng termasuk dalam wilayah dikategorikan pada daerah yang relatif tertinggal, hal ini bisa terjadi karena wilayah referensi dalam penelitian ini ialah seluruh provinsi di Pulau Jawa yang mana terjadi ketidakmerataan tingkat PDRB antar enam provinsi yang ada

Kata kunci: esteban marquillas, aksesibilitas, klassen**Abstract**

Regional potential within the framework of regional autonomy is increasingly explored in terms of science and field. Regional autonomy that has been echoed since 2001 requires regions and is responsible for managing existing sources of income that improve the regional economy. The potential of the area in this study was explored using the shiftshare E-M analysis tool, quotient connectivity (CQ), and Klassen Typology. The results of this study are (1) competitive and specialized sectors in Central Java Province in 2010-2016, namely the manufacturing industry sector because it has high competitiveness because the Differential Shift value (Cj) is greater than Central Java Shares (Nj). (2) CQ of Central Java Province comparing provinces in Java Island can be seen as Central Java Province including in having a position that is less favorable in involving with other provinces. While CQ of each regency / city in the province of Central Java compared to Central Java Province can be seen among 19 districts / cities belonging to areas that have a high level of accessibility, namely Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Kudus, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Magelang City, Surakarta City, Salatiga City, Semarang City, and Pekalongan City. (3) Central Java Province relies on quadrant four where Central Java is included in the region categorized in relatively disadvantaged areas, this can occur because the reference area in this study in all provinces in Java Island where there is inequality in GRDP levels between six provinces

Keywords: ECM, Poverty, Labor, Education, GRDP

✉ Corresponding author:

E-mail: riandestiningsih@untidar.ac.id

PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dapat diupayakan dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan

dengan pelaksanaan otonomi daerah (Suparno, 2008:5). Potensi daerah berupa kekayaan alam atau komoditas unggulan yang dimiliki daerah menjadi faktor pendukung penting sebagai modal bagi pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 1

Kemiskinan Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2010-2016 (dalam Ribuan)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	13,01	15,15	366,77	375,70	412,79	368,67	385,84
Jawa Barat	4.773,72	4.648,63	184,24	4.382,65	4.238,96	4.485,65	4.168,11
Jawa Tengah	223,72	212,82	202,65	4.704,87	4.561,82	4.505,78	4.493,75
DI.Yogyakarta	24,06	560,88	23,42	22,30	22,21	20,25	488,83
Jawa Timur	230,40	223,18	206,70	4.865,82	197,86	4.775,97	193,29
Banten	31,59	28,78	27,02	682,71	27,05	690,67	657,74

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa. Kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa sejak tahun 2010 sampai 2016 terletak di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari sisi banyaknya jumlah penduduk miskin (Tabel 1). Apabila melihat data laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan

Provinsi Jawa Tengah ada diperingkat keempat dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa dan tingkat Nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat dinilai belum optimal, karena segenap potensi yang dimiliki daerah belum dikembangkan secara maksimal bagi perekonomian.

Tabel 2

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2013-2016 (dalam %)

Tahun	Jateng	Jabar	Jatim	DIY	DKI Jakarta	Banten	Nasional
2013	5,11	6,33	6,1	5,49	6,07	0,29	2,56
2014	5,28	5,09	5,9	5,16	5,91	0,55	5
2015	5,44	5,04	5,4	4,94	5,88	5,45	4,9
2016	5,28	5,67	5,5	5,05	5,74	0,28	5

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Dalam era otonomi daerah tentunya sangat diharapkan tercapainya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga pemerintah daerah harus berupaya menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada secara intensif agar dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Untuk mengidentifikasi potensi wilayah melalui *shift share esteban marquiles*, *connectivity quotient* dan tipologi kelas.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Arsyad (1999:108), pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah

tersebut. Menurut Sukirno (2006: 9) pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penelitian Terdahulu

1. Rifki Adhitama (2012) dengan judul Pengembangan Sektor-Sektor Ekonomi Di Tiap Kecamatan Di Kabupaten Magelang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Location Quotient* (LQ), *Shift-Share*, dan *Klassen* Tipologi Pendekatan Sektoral. Hasil dari penelitian tersebut adalah sektor jasa, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Magelang mendominasi sektor unggulan yang ada di tiap kecamatan di Kabupaten Magelang. Tercatat terdapat 9 kecamatan yang memiliki sektor unggulan di sektor jasa yaitu Kecamatan Windusari, Dukun, Ngluwar, Salaman, Muntilan, Secang, Tegalarjo, Ngablak, dan Pakis, 8 kecamatan yang memiliki keunggulan di sektor pertanian yaitu Kecamatan Kajoran, Bandongan, Borobudur, Tegalarjo, Sawangan, Pakis, Srumbung dan Ngablak dan 7 kecamatan yang memiliki keunggulan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu Kecamatan Borobudur, Mungkid, Candimulyo, Mertoyudan, Sawangan dan Kecamatan Secang.
2. Diah Setyorini Gunawan dan Ratna Setyawati Gunawan (2008) dengan judul Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten-Kabupaten Anggota Lembaga Regional Barlingmascakeb. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode tahun 1995-2002. Penelitian ini menggunakan analisis Tipologi *Klassen*, analisis model rasio pertumbuhan (MRP), analisis *location quotient* (LQ), analisis Indeks Divergensi Krugman, dan analisis

Connectivity Quotient (CQ). Temuan dari penelitian yaitu Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat. Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal.

3. Moch. Ardi Prasetiawan, dkk (2015), dengan judul *The Competitiveness And Economic Performance Of Regency/City In East Java Indonesia*. Penelitian ini menganalisis tipologi daya saing dan kinerja ekonomi kabupaten/kota Jawa Timur, dan mengetahui pengaruh daya saing daerah terhadap kinerja ekonominya. Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang menggunakan beberapa instrumen analisis, yaitu: Analisis Faktor Konfirmasi atau *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), *Regression Analisis* dan *Tipologi Wilayah*. Hasilnya menunjukkan 1) Daya Saing yang terdiri dari indikator kekuatan, fasilitas pelayanan publik, dan iklim investasi terbukti mempengaruhi kinerja ekonomi; 2) Iklim investasi memiliki peran terbesar dibandingkan dengan aspek kekuatan regional dan pelayanan publik; 3) Aspek kekuatan daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing adalah kualitas sumber daya manusia; 4) Pelayanan fungsi wajib untuk menyediakan infrastruktur pendidikan telah memberikan kontribusi terbesar terhadap determinan daya saing daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Tengah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan yaitu

- a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHK 2010
- b. PDRB Per Kapita tahun 2010-2016 ADHK 2010

Metode Analisis

1. Shiftshare Esteban Marquillas (SS-EM)

Merupakan modifikasi analisis shiftshare klasik. Modifikasi meliputi pendefinisian kedudukan atau keunggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dan penciptaan komponen keempat yaitu pengaruh lokasi.

Tabel 3

Kriteria Shiftshare Esteban Marquillas

	$r_{ij} - r_{in} > 0$	$r_{ij} - r_{in} < 0$
$E_{ij} - E'_{ij} > 0$	Kompetitif Terspesialisasi	Tidak kompetitif Terspesialisasi
$E_{ij} - E'_{ij} < 0$	Kompetitif Tidak terspesialisasi	Tidak kompetitif Tidak terspesialisasi

2. Connectivity Quotient (CQ)

Analisis CQ digunakan untuk mendeskripsikan akses antarkota dalam suatu wilayah. Perhitungan CQ dilakukan dengan cara sebagai berikut (Bendavid-Val, 1991: 160).

- a. Hitung jarak dari suatu kabupaten ke kabupaten lainnya dalam suatu wilayah.
- b. Hitung total jarak untuk semua kabupaten, kemudian bagi dengan jumlah kabupaten untuk mendapatkan jarak rata-rata (*regional average*).
- c. Bagi total jarak dari setiap kabupaten dengan *regional average* untuk

mendapatkan nilai *connectivity quotient*.

Kriteria pengukuran *connectivity quotient*, yaitu apabila $CQ < 1$, berarti tingkat aksesibilitas suatu kota lebih tinggi. Dan sebaliknya, apabila $CQ > 1$, berarti tingkat aksesibilitas suatu kota lebih rendah.

3. Klassen Typologi

Tipologi daerah klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita daerah.

Tabel 4

Kriteria Klassen Typologi

	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	Daerah Berkembang Cepat
$r_i < r$	Daerah Maju Tapi Tertekan	Daerah Relatif Tertinggal

Keterangan :

- y = PDRB per kapita provinsi
- r = pertumbuhan PDRB provinsi
- y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota
- r_i = pertumbuhan PDRB kabupaten/kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Shiftshare Esteban Marquillas (SS-EM)

Shift Share klasik meliputi tiga komponen yaitu komponen pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Sedangkan *Shiftshare Esteban Marquillas* ada empat komponen,

tiga komponen sama dengan shiftshare klasik dan satu kaitan tambahan yaitu pertumbuhan pangsa wilayah yang diurai menjadi komponen spesialisasi dan komponen kompetitif, kedua komponen ini dinamakan dengan komponen efek alokasi. Berdasarkan hasil perhitungan *shiftshare esteban marquillas* Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016, sektor yang kompetitif dan

terspesialisasi adalah sektor industri pengolahan.

Tabel 5
Hasil Perhitungan *Shiftshare Esteban Marquillas* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016

	Kompetitif rij-rin > 0	Tidak kompetitif rij-rin < 0
Terspesialisasi Eij-E'ij > 0	Sektor Kompetitif dan Terspesialisasi	Sektor Tidak kompetitif tapi Terspesialisasi
	1. Industri Pengolahan	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan dauh ulang 3. Konstruksi
Tidak Terspesialisasi Eij-E'ij < 0	Sektor Kompetitif namun Tidak terspesialisasi	Sektor Tidak kompetitif dan Tidak terspesialisasi
	1. Pertambangan dan penggalan 2. Pengadaan listrik dan gas 3. Real estate 4. Jasa perusahaan 5. Jasa pendidikan 6. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 2. Transportasi dan pergudangan 3. Penyediaan akomodasi dan makan minum 4. Informasi dan komunikasi 5. Jasa keuangan dan asuransi 6. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 7. Jasa lainnya

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian

Jawa Tengah memiliki jenis tanah yang didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan gromosol, sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik. Kondisi ini menjadikan pertanian dan perkebunan memiliki spesialisasi yang tinggi mengingat Jateng merupakan daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan hidup masyarakat sejauh ini masih berkuat pada produktivitas sehingga mengabaikan sisi pasca produksi. Pertanian identik dengan produk, hasil, kualitas dan pasar, untuk itu pemerintah harus mampu membukakan pasar bagi petani untuk mempermudah penyaluran produk pasca panen. Beberapa program yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya antara lain program penerapan peningkatan teknologi, program peningkatan

pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan dan perkebunan, program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, program pengembangan agribisnis dalam menjual hasil produksi pertanian.

2. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang tidak terspesialisasi namun memiliki keunggulan kompetitif, hal ini karena besarnya potensi pertambangan mineral baik logam maupun non logam di Jawa Tengah, namun potensi ini belum terolah secara maksimal sehingga memicu penyimpangan. Terdapat potensi sumber daya mineral dan batubara yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ada 13 jenis mineral prospektif ada di Jateng seperti, seperti diorit, marmer, trass, feldspar, fospat, ballclay, batu kapur, kaolin, bentonit, pasir kwarsa, andesit, tanah liat, dan pasir besi. Untuk kawasan pertambangan mineral sebagaimana

diatur dalam Perda Provinsi Jateng No.5/2006 terletak di Kawasan Majenang Bantarkawung, Kawasan Serayu Pantai Selatan dan Utara, Gunung Slamet, Pegunungan Sumbing Sindoro Dieng, Pegunungan Merapi Merbabu Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara dan Selatan, Gunung Lawu, serta Pegunungan Selatan Wonogiri. Agar menjadi sektor yang terspesialisasi maka harus mengoptimalkan pengelolaan pertambangan dengan menggali berbagai bahan tambang yang masih banyak terkandung di seluruh wilayah Jawa Tengah yang selama ini masih terjaga dari aktivitas pertambangan serta diolah hingga memiliki nilai yang lebih tinggi sesuai aturan yang berlaku mengingat Jawa Tengah berada dalam jalur gunung api dan mineralisasi menjadikan Jateng kaya sumber daya mineral, serta didukung dengan pemetaan yang baik, daerah mana saja yang bisa ditambang sehingga akan mendorong investor untuk berinvestasi.

3. Sektor Industri Pengolahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki spesialisasi dan keunggulan kompetitif pada sektor ini, saat ini perekonomian Jateng didominasi oleh industri pengolahan terutama garmen yang menjadi produk andalan guna menyokong perekonomian masyarakat khususnya yang dibeberapa kota yakni Semarang, Solo dan Pekalongan. Selain hal tersebut Jateng memiliki sumber daya bahan baku serta memiliki potensi usia produktif, berdasar data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah bahwa sektor industri pengolahan mampu menyerap Tenaga Kerja hingga 20% dari total tenaga kerja yang terdapat di provinsi ini, hal ini tentu dapat dimanfaatkan secara optimal di era pasar global.

4. Sektor Pengadaan Listrik Dan Gas

Ketergantungan manusia akan listrik semakin besar yang berdampak pada bertambahnya jumlah pelanggan PLN. Pada tahun 2014, jumlah pelanggan listrik PLN bertambah sekitar 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran listrik oleh PLN dibagi menjadi 10 unit PLN yaitu cabang Semarang, Surakarta, Purwokerto, Tegal, Magelang, Kudus, Salatiga, Klaten, Pekalongan dan Cilacap. Dari total listrik di Jawa Tengah yang disalurkan, 57 persen dialirkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sisanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan industri, usaha, pemerintah dan lain lain. Persentase aliran listrik yang disalurkan ke rumah tangga semakin menurun, sementara persentase aliran ke industri semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perindustrian di wilayah jawa tengah, sedangkan lainnya relatif stabil meski apabila dibandingkan dengan jumlah perindustrian di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur maupun Banten Jawa Tengah relatif lebih kecil. Hal itulah yang menyebabkan sektor ini menjadi sektor yang memiliki keunggulan kompetitif meski tidak terspesialisasi. Oleh karenanya penempatan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan di Provinsi Jawa Tengah perlu diprioritaskan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik.

5. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang

Kebutuhan akan penggunaan air bersih yang terus meningkat setiap tahunnya mendorong sektor ini mampu memberikan kontribusi yang tinggi bagi Provinsi Jawa Tengah, hal ini didukung oleh pelayanan dan administrasi yang baik serta sarana dan prasarana

penunjang yang baik pula, namun sektor ini tidak memiliki keunggulan kompetitif oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan sub sektor pengelolaan sampah dan limbah yang sebelumnya belum optimal. Secara statistik, Provinsi Jawa Tengah terus mengalami pertambahan jumlah penduduk diiringi oleh meningkatnya aktivitas masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan jumlah sampah. Ada beberapa upaya untuk mengelola sampah dengan cara mereduksi sampah serta membentuk suatu kelompok masyarakat pengolah sampah. Peningkatan pengolahan sampah perlu dilakukan sehingga sampah dapat memiliki nilai karena sub pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang saat ini masih belum dilakukan secara komersial. Banyak sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dibuang dalam lubang/bakar, di tempah sampah kemudian diangkut, hingga masih terdapat sampah tanpa dikelola atau didaur ulang terlebih dahulu langsung dibuang di sungai/ aliran irigasi atau lainnya.

6. Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi ialah sektor yang terspesialisasi namun tidak memiliki keunggulan kompetitif untuk itu pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dipercepat. Hal ini karena sektor konstruksi akan sangat mendorong daya saing daerah. Banyaknya pembangunan yang dilakukan akan mendorong banyak investor menanamkan modalnya, maka saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah seperti jembatan, pasar, jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga kawasan industri Kendal. Meskipun memiliki keunggulan kompetitif, sektor ini tidak terspesialisasi, oleh karenanya dengan pembangunan yang terus dilakukan kedepan sektor ini akan menjadi sektor yang memiliki

spesialisasi seiring dengan pertumbuhannya.

7. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor ini merupakan sektor yang tidak terspesialisasi serta tidak memiliki keunggulan kompetitif, ini terjadi karena dampak perekonomian Indonesia dari tahun 2013-2015 yang kurang baik, nilai tukar rupiah yang melemah hingga berimbas terhadap sektor perdagangan oleh karenanya Pemprov Jawa Tengah beserta jajaran terkait melakukan suatu hal untuk mendorongnya dengan cara memperkuat koordinasi lewat forum Koridor Ekonomi Perdagangan, Investasi dan Pariwisata atau disingkat dengan nama "Keris". Pemerintah daerah juga terus memperbaiki berbagai pasar-pasar sehingga mampu meningkatkan produktivitas perdagangan sehingga harapannya keunggulan kompetitifnya dibidang ini akan terus bertambah.

8. Sektor Transportasi Dan Pergudangan

Sektor transportasi angkutan di Jawa Tengah kondisinya kian miris, sektor ini tidak ada spesialisasi dan tidak ada keunggulan kompetitif, hal ini merupakan akibat dari menurunnya jumlah angkutan umum. Di Jawa Tengah, angkutan pedesaan yang beroperasi kini hanya tinggal 20 persen, sehingga beberapa trayek transportasi pedesaan sudah hilang. Jumlah bus angkutan daerah antar provinsi yang beroperasi sudah kurang dari 40 persen dengan volume okupansi kurang dari 40 persen. Memburuknya sektor transportasi ini sebagai akibat manajemen layanan transportasi umum yang tidak banyak berubah.

9. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor ini masih didominasi oleh para UKM, namun kontribusinya masih rendah karena keterbatasan sumber daya finansial. Seiring dengan pertumbuhan

sektor pariwisata bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan sektor ini. Lembaga penyedia keuangan terus mendorong masyarakat untuk melakukan penyerapan pinjaman modal yang telah disediakan terutama di sektor ini, sehingga kedepan UKM, penginapan-penginapan bisa berkembang mengingat sub sektor pariwisata yang terus meningkat sehingga sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bisa tumbuh beriringan dan terspesialisasi serta memiliki keunggulan kompetitif.

10. Sektor Informasi dan Komunikasi

Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang tidak terspesialisasi dan tidak ada keunggulan kompetitif, hal ini merupakan dampak dari pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak merata, pembangunan tersebut hanya fokus ke DKI Jakarta sebagai titik utama pembangunan sedangkan daerah yang berada di sekitarnya seperti Banten dan Jawa Barat termasuk Jateng, DIY dan Jawa Timur meski terus dilakukan pembangunan serta perbaikan teknologi informasi dan komunikasi namun pembangunannya tidak semasif seperti DKI Jakarta. Badan Pusat Statistik pernah merilis terkait Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Ternyata, selama empat tahun, dari 2012 sampai 2015, pembangunan tersebut hanya fokus ke DKI Jakarta. IP-TIK merupakan ukuran standar yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah yang mengukur kesenjangan digital antar wilayah, mengukur potensi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, serta mendorong pertumbuhannya.

11. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Sektor jasa keuangan Provinsi Jawa Tengah merupakan sektor yang tak

terspesialisasi dan tidak memiliki keunggulan kompetitif, hal ini tentu harus segera diatasi mengingat banyaknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah pada tahun 2016 dinyatakan dalam kondisi kurang sehat maupun tidak sehat, karena tingkat kredit macetnya di atas 10,15% serta di atas 15%, di samping BPR, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jateng pada tahun 2017 juga banyak yang tidak sehat yakni sebanyak 15 BKK dari total 29 BKK yang ada di Jawa Tengah. Selain itu upaya pengembangan industri jasa keuangan tidak hanya fokus pada sektor keuangan, tetapi harus diawali dengan pemberdayaan ekonomi. Baik mikro, kecil, menengah, maupun ekonomi skala besar, terlebih di Jawa Tengah, yang menjadi daya dukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor UMKM. UMKM harus diberdayakan untuk mendorong jasa keuangan karena salah satu persoalan yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal. Selain hal tersebut sub sektor asuransi perlu dioptimalkan, karena perekonomian yang kurang baik di tahun 2016 dan kurangnya pemahaman yang baik juga berdampak pada sub sektor asuransi, dengan perbaikan perekonomian serta pemahaman masyarakat akan kebutuhan asuransi diharapkan akan terjadi peningkatan pada sub sektor asuransi.

12. Sektor *Real Estate*

Sektor Real Estate merupakan sektor yang tidak terspesialisasi namun memiliki keunggulan kompetitif, ini terjadi karena laju pertumbuhan industri properti yang tengah melambat di Jawa Tengah, yang dikarenakan masih minimnya daya beli masyarakat. Lesunya daya beli masyarakat bisa dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah yang relatif kecil. Rendahnya UMK nyatanya tidak menghentikan

kenaikan harga real estate yang terjadi pada tiap tahunnya, namun kenaikan harga properti ini pada dasarnya bagus karena merupakan hal yang baik bagi dunia investasi khususnya sektor properti. Kalau harga tidak naik pasti orang juga menjadi enggan untuk membeli properti.

13. Sektor Jasa Perusahaan

Aktivitas perekonomian yang tinggi akan mengundang investor untuk berdatangan menanamkan modalnya diberbagai sektor sehingga juga akan berimbas pada sektor jasa perusahaan pula. Perekonomian Indonesia yang kurang baik hingga tahun 2016, karena nilai tukar rupiah terus melemah dan daya beli masyarakat menurun, juga beribas pada Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu aktivitas ekonomi harus ditingkatkan dengan membangun sarana prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian. Iklim investasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang cukup baik menjadikan sektor ini menjadi sektor kompetitif, namun Pemerintah Provinsi harus terus berusaha menarik investasi untuk mendorong peningkatan perekonomian wilayah. Dengan ini harapannya sektor jasa perusahaan juga akan tumbuh dan memiliki spesialisasi dan keunggulan.

14. Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kinerja administrasi pemerintah yang baik akan mendorong pertumbuhan sektor ini akan tumbuh dengan baik. Sektor ini merupakan sektor yang tidak terspesialisasi juga tidak memiliki keunggulan kompetitif, hal itu terjadi karena kekacauan administrasi di internal Pemprov Jateng. Satu hal yang terjadi beberapa waktu lalu, akibat adanya penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng, karena penerapan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan

masalah berupa 154 pejabat eselon III dan IV terpaksa non-job dan 707 PNS yang bertugas di sembilan Balai Pengelola Hutan (BPH) menganggur karena tak ada anggaran kegiatan yang dialokasikan dari APBD 2017. Terlebih, 861 Aparatur Sipil Negara (ASN) 3 bulan tidak menerima gaji.

15. Sektor Jasa Pendidikan

Kesadaran masyarakat Jateng yang meningkat akan pentingnya pendidikan menyebabkan pendidikan merupakan sektor yang kompetitif di sini, namun hal ini disayangkan apabila tidak terspesialisasi, untuk itu perlu perhatian khusus bagi pemerintah dalam meningkatkan keunggulan dengan cara memperbaiki kualitas sekolah sekolah yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Upaya yang dilakukan ini meliputi ketersediaan sarpras yang memadai, keterjangkauan dalam pengadaannya, maupun kualitas sarpras yang diadakan. Selain itu perlu adanya dorongan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk jenjang SLTA maupun perguruan tinggi sehingga akan mendorong perbaikan sektor pendidikan. Di luar itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak semua pihak, terutama jajaran pendidikan tinggi hingga prasekolah agar terus meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah tersebut penting dilakukan guna menjawab berbagai tantangan dunia pendidikan di masa depan.

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Sektor Kompetitif dan Tidak Terspesialisasi)

Meski sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tidak terspesialisasi namun sektor ini memiliki keunggulan kompetitif hal ini disebabkan karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pembangunan bidang kesehatan di Jateng dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan hal ini ditandai dari kasus kematian ibu yang terus mengalami penurunan setiap tahun. Sementara itu, angka harapan hidup di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Salah satu program yang dilaksanakan sebagai bentuk fasilitas kesehatan kepada masyarakat adalah adanya balai kesehatan masyarakat untuk semua kalangan termasuk UKM. Faskes UKM sekunder, bertujuan untuk memperkuat UKM dengan harapan program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

17. Sektor Jasa Lainnya

Sektor ini merupakan sektor yang tidak terspesialisasi dan tidak memiliki keunggulan kompetitif, ini sangat bertolak belakang dengan potensi pariwisata dengan keragaman budaya, wisata sejarah dan wisata alam menarik di Provinsi Jawa Tengah untuk dikunjungi oleh wisatawan. Terdapat 467 daya tarik wisata itu tersebar di 35 kota dan kabupaten di Jateng dengan rincian 148 wisata alam, 85 wisata budaya, 117 wisata buatan, 19 wisata minat khusus, dan 98 pergelaran, namun yang terjadi wisatawan banyak yang hanya memilih datang ke Candi Borobudur, Museum Fosil Sangiran, atau Kepulauan Karimun Jawa saja karena minimnya promosi dan inovasi pada objek wisata lainnya, selain itu sebagian besar dari daya tarik wisata tersebut banyak yang belum terjamah

atau dikelola dengan baik. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri; pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Analisis Connectivity Quotient (CQ)

Analisis *connectivity quotient* digunakan untuk mendeskripsikan akses antarkota dalam suatu wilayah. Adapun kriteria pengukuran *connectivity quotient*, yaitu apabila $CQ < 1$, berarti tingkat aksesibilitas suatu kota lebih tinggi. Dan sebaliknya, apabila $CQ > 1$, berarti tingkat aksesibilitas suatu kota lebih rendah. Aksesibilitas yang dimaksud berasal dari sisi jarak antara wilayah satu dengan wilayah lain dalam suatu wilayah administrasi yang lebih luas. Berdasarkan hasil perhitungan CQ dapat ditarik kesimpulan bahwa enam provinsi yang terdapat di Pulau Jawa memiliki posisi yang berbeda-beda dalam berinteraksi antar provinsi. Hal ini dapat dilihat dari nilai CQ yang bervariasi nilainya antara 0 dan 1. Berdasarkan hasil analisis CQ, dapat dikatakan bahwa Provinsi DKI, Jawa Barat dan DIY memiliki posisi yang menguntungkan (nilai $CQ < 1$), sedangkan tiga provinsi lainnya yakni Provinsi Banten, Jateng dan Jatim memiliki posisi kurang menguntungkan (nilai $CQ > 1$) dalam berinteraksi dengan provinsi- provinsi

lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai CQ Provinsi DIY adalah yang tertinggi.

Tabel 6
Perhitungan CQ Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa

No	Kecamatan	CQ	Peringkat
1.	Banten	1,03	4
2.	DKI	0,83	2
3.	Jawa Barat	0,86	3
4.	Jawa Tengah	1,05	5
5.	DIY	0,82	1
6.	Jawa Timur	1,41	6

Selain hasil analisis CQ terhadap enam kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. provinsi di Pulau Jawa, juga dilakukan analisis Berikut hasil analisis CQ Provinsi Jawa connectivity quotient pada 35 kabupaten dan Tengah.

Tabel 7
Perhitungan CQ kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	CQ	Peringkat
1.	Cilacap	1,48	35
2.	Banyumas	1,25	31
3.	Purbalingga	1,11	26
4.	Banjarnegara	0,95	16
5.	Kebumen	1,04	23
6.	Purworejo	0,91	12
7.	Wonosobo	0,85	9
8.	Magelang	0,77	4
9.	Boyolali	0,84	8
10.	Klaten	0,99	19
11.	Sukoharjo	0,98	18
12.	Wonogiri	1,11	27
13.	Karanganyar	1,01	22
14.	Sragen	1,01	21
15.	Grobogan	0,91	14
16.	Blora	1,25	32
17.	Rembang	1,29	34
18.	Pati	1,09	25
19.	Kudus	0,98	17
20.	Jepara	1,14	28
21.	Demak	0,86	10
22.	Semarang	0,77	3
23.	Temanggung	0,75	1
24.	Kendal	0,81	7
25.	Batang	0,91	13
26.	Pekalongan	1,00	20
27.	Pemalang	1,07	24
28.	Tegal	1,24	30
29.	Brebes	1,28	33
30.	Kota Magelang	0,78	5
31.	Kota Surakarta	0,91	11
32.	Kota Salatiga	0,75	2
33.	Kota Semarang	0,79	6
34.	Kota Pekalongan	0,94	15
35.	Kota Tegal	1,21	29

Hasil analisis CQ pada 35 kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat 16 kabupaten/kota memiliki tingkat aksesibilitasnya yang rendah atau posisi yang kurang menguntungkan dalam berinteraksi dengan wilayah lainnya di Provinsi Jawa Tengah, sementara 19 kabupaten/kota tergolong ke dalam wilayah yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi. Sebagai wilayah dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi serta berada pada posisi yang menguntungkan dalam berinteraksi dengan provinsi-provinsi lainnya maka kabupaten/kota tersebut harus dioptimalkan yang tentunya dengan memerhatikan potensi masing-masing wilayah yang merujuk pada hasil analisis Shift Share Esteban Marquiles Jawa Tengah sebelumnya. Semakin tinggi tingkat aksesibilitas suatu wilayah, maka akan berdampak pada tingginya arus produksi serta distribusi sehingga aktivitas

perekonomian suatu wilayah terus mengalami peningkatan, oleh karenanya pemerintah harus terus mendorong beberapa wilayah yang masih berada pada golongan wilayah dengan tingkat aksesibilitas yang rendah agar kedepannya wilayah-wilayah tersebut memiliki interaksi yang menguntungkan dengan wilayah lainnya atau dalam artian memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi.

Analisis Tipologi Klassen

Klassen tipologi membagi daerah atau wilayah menjadi empat kuadran yaitu kuadran I (daerah maju dan cepat tumbuh), kuadran II (daerah maju tapi tertekan), kuadran III (daerah berkembang cepat), dan kuadran IV (daerah relatif tertinggal). Dimana indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita dan jumlah penduduk.

Tabel 8
Tipologi Klassen Barlingmascakeb Tahun 2013-2016

	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	DKI Jakarta	Banten, Jawa Timur
$r_i < r$	-	Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta

Berdasarkan kriteria kelas tipologi wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Provinsi DKI Jakarta termasuk kuadran I atau daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*). Dengan kata lain DKI Jakarta mempunyai laju pertumbuhan dan PDRB per kapita di atas rata-rata pendapatan per kapita Pulau Jawa.
2. Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kuadran III atau daerah berkembang cepat. Dengan kata lain Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur mempunyai laju pertumbuhan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan Pulau Jawa dan PDRB per kapita lebih tinggi

rata-rata diatas PDRB per kapita Pulau Jawa.

3. Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta termasuk dalam kuadran IV atau daerah relatif tertinggal. Dengan kata lain Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta mempunyai laju pertumbuhan dan PDRB per kapita lebih rendah dari rata-rata diatas PDRB per kapita Pulau Jawa.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen Provinsi Jawa Tengah berada pada kuadran empat dimana Jateng termasuk dalam wilayah dikategorikan pada daerah yang relatif tertinggal, hal ini bisa terjadi karena wilayah referensi dalam penelitian ini ialah seluruh provinsi di Pulau Jawa yang mana terjadi ketidakmerataan tingkat PDRB antar

enam provinsi yang ada. Misalnya Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi jauh di atas lima provinsi lainnya, selain tingkat pendapatan per kapita yang rendah, tingkat pertumbuhan PDRB Jawa Tengah juga berjalan lebih lambat yakni 5,30% hal ini berada di bawah rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita pulau jawa yang sebesar 5,90%. Ketertinggalan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari Jawa Tengah. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN & IMPLIKASI

Kesimpulan

Dari hasil dari analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Shiftshare Esteban Marquillas (SS-EM)** merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor atau lapangan usaha yang berdaya saing di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016. Sektor yang kompetitif dan terspesialisasi di Provinsi Jawa Tengah yaitu sektor industri pengolahan karena memiliki daya saing tinggi karena nilai Differential Shift (Cj) lebih besar daripada Jawa Tengah Share (Nj).
2. **Connectivity quotient (CQ)** merupakan alat untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki posisi paling menguntungkan ditinjau dari tingkat aksesibilitas. Dalam penelitian ini CQ dihitung dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi Provinsi Jawa Tengah dibandingkan provinsi di Pulau Jawa, dan CQ setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
 - a. Dalam perhitungan CQ Provinsi Jawa Tengah dibandingkan provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat bahwa

Provinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam memiliki posisi kurang menguntungkan dalam berinteraksi dengan provinsi- provinsi lainnya.

- b. Dalam perhitungan CQ setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa ada 19 kabupaten/kota tergolong ke dalam wilayah yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi yakni Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Kudus, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.
3. **Typologi Klassen** merupakan alat untuk mengidentifikasi posisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun diantara provinsi lain di Pulau Jawa ditinjau dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita. Provinsi Jawa Tengah berada pada kuadran empat dimana Jateng termasuk dalam wilayah dikategorikan pada daerah yang relatif tertinggal, hal ini bisa terjadi karena wilayah referensi dalam penelitian ini ialah seluruh provinsi di Pulau Jawa yang mana terjadi ketidakmerataan tingkat PDRB antar enam provinsi yang ada.

Implikasi

Pengembangan Provinsi Jawa Tengah sebaiknya dilakukan dengan memacu kinerja sektor ekonomi agar mampu tumbuh cepat dan memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB. Utamanya investasi, insentif, dan kebijakan ekonomi lainnya perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi dari sektor yang memiliki kompetitif sekaligus menjadi spesialisasi. Salah satu strateginya dengan mengupayakan sektor ekonomi sesuai dengan kontribusi dalam pembentukan PDRB. Tujuh belas sektor

ekonomi di kembangkan menurut periode waktunya dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu prioritas pengembangan ekonomi untuk masa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus pada pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang masuk dalam kategori sektor kompetitif dan terspesialisasi agar dapat mendorong pertumbuhan lebih cepat lagi. Dalam jangka menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mengupayakan sektor yang saat ini berstatus sektor kompetitif namun tidak terspesialisasi dengan memperbesar porsi outputnya pada perekonomian daerah, dan sektor tidak kompetitif namun terspesialisasi agar diupayakan menjadi sektor prima dalam jangka panjang, Selain itu perlunya dukungan dari sisi kualitas infrastruktur seperti kualitas jalan, lebar jalan, penerangan listrik, dan kebijakan penunjang seperti titik lokasi penanaman investasi, serta tata ruang wilayah yang memadai. Dengan demikian, diharapkan mobilitas sumberdaya ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah akan lebih lancar sehingga interaksi antar daerah tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian daerah dan pada akhirnya memberi spread effect pada daerah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriculture and national resources of the UK
Departement for International
Development (DFID) and Steve
Wiggins, 2004. "Agriculture,
Hunger and Food Security"
Andi Posman Simamora, Sirojuzilam dan
Supriadi. 2013. Analisis potensi
sektor pertanian terhadap
pengembangan wilayah di
Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Jurnal Ekonom, Vol 16, No 2, April
2013 (halaman 54-66)
Bayu Wijaya dan Hastarini Dwi Atmanti.
2006. Analisis Pengembangan
Wilayah dan Sektor Potensial
Guna Mendorong Pembangunan di
Kota Salatiga. *Dinamika
Pembangunan*, No. 2 Desember
2006 (halaman 101 - 118)
Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik
Regional Bruto 2010-2016*.
Semarang
Ni Luh Aprilia Kesuma dan I Made Suyana
Utama. 2015. Analisis sektor
unggulan dan pergeseran pangsa
sektor-sektor ekonomi Kabupaten
Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi
Pembangunan Universitas Udayana*
Vol. 4, No. 3 halaman : 169 - 179,
Maret 2015
Nurhayati, Siti Fatimah dan Haris. 2002.
Analisis Penentuan Spesialisasi
Sektor di Kabupaten Boyolali
dalam Menghadapi Implementasi
Otonomi Daerah Masa Krisis
Ekonomi 1997-1999. *Jurnal
Ekonomi Pembangunan Volume 3
Nomor 1*.
Sabana, Choliq. 2007. Analisis Pengembangan
Kota Pekalongan Sebagai Salah
Satu Kawasan Andalan di Jawa
Tengah. Tesis. Magister Ilmu
Ekonomi dan Studi Pembangunan
Universitas Diponegoro. Semarang.
(Tidak Dipublikasikan).